

KESIAPAN TENAGA KERJA DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) DI KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

Oleh

Sunasih Mulianingsih*)

ABSTRACT

Employment is very important in the world for economic field. In the employment readiness, the main problem faced by almost all districts/cities in Indonesia in facing the MEA is the high unemployment due to the low level of education resulting in low levels of skill from the workforce. It is also faced by Sukabumi City. The purpose of this research is to know how far the readiness of Local Government of Sukabumi in facing the era of ASEAN economic society and how far the readiness of the society to the creative economy business competition, to know what efforts taken by the government of Sukabumi in order to guarantee people's right to get job and ease of business; as well as to know what efforts and obstacles faced by Indonesian entrepreneurs and business community to increase the skills of local workers and able to compete with similar products from ASEAN countries.

This study using a descriptive research with qualitative approach with data source from interview result and literature review which analyzed based on result of survey, interview and literature. The result shows that Sukabumi City is considered has a good employment readiness. The readiness of The Local Government of Sukabumi City in facing the era of Society of Economic ASEAN (MEA) based on the results of this study are The Local Government of Sukabumi City has prepared the community empowerment program in accordance with the superior products that will be used as icon in facing the MEA such as giving training and courses directly related to MA preparation needs. The readiness of the community in the competition of the creative economy of the community must follow the formal education that has been obliged by the government and it is recommended to follow education and training activities held by local government and companies in Sukabumi.

Key words: *radiness, employment, ASEAN Economic Society (MEA), local government*

ABSTRAK

Ketenagakerjaan sangat penting dalam perekonomian dunia. Dalam kesiapan ketenagakerjaan, permasalahan utama yang dihadapi oleh hampir

semua kabupaten/kota di Indonesia dalam menghadapi MEA adalah tingginya pengangguran akibat rendahnya tingkat pendidikan yang mengakibatkan rendahnya tingkat keahlian dari tenaga kerja. Hal ini juga dihadapi oleh Kota Sukabumi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana kesiapan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dalam menghadapi era masyarakat ekonomi ASEAN dan sejauhmana kesiapan masyarakat terhadap persaingan usaha ekonomi kreatif, untuk mengetahui upaya apa yang telah ditempuh oleh pemerintah Kota Sukabumi sehingga hak masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan dan kemudahan usaha dapat terjamin; serta untuk mengetahui upaya apa dan hambatan apa saja yang dihadapi oleh pengusaha dan dunia usaha Indonesia untuk menambah keterampilan tenaga kerja lokal dan mampu bersaing dengan produk sejenis dari negara ASEAN.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan sumber data dari hasil wawancara dan peninjauan literatur yang dianalisis berdasarkan hasil survey, wawancara dan literature.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kota Sukabumi dianggap memiliki kesiapan yang lebih baik dibandingkan dengan daerah lain. Kesiapan pemerintah Daerah Kota Sukabumi dalam menghadapi era masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) berdasarkan hasil penelitian antara lain pemerintah Kota Sukabumi sudah menyusun program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan produk unggulan yang akan dijadikan icon dalam menghadapi MEA antara lain memberikan diklat dan kursus yang langsung berhubungan dengan kebutuhan persiapan MA. Misalnya memberikan pelatihan tentang house keeping untuk perhotelan sebab dalam rangka MEA jumlah hotel di Kota Sukabumi bertambah dan pelatihan pengelolaan potensi unggulan Sukabumi seperti pembuatan batik khas sukabumi, kerajinan dan lain sebagainya untuk tenaga kerja yang siap disalurkan keperusahaan-perusahaan yang ada di Sukabumi Pemerintah Daerah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan tersebut dalam mengadakan pelatihan yang sesuai kebutuhan perusahaan. Sedangkan kesiapan masyarakat dalam persaingan usaha ekonomi kreatif masyarakat wajibkan mengikuti pendidikan formal yang sudah diwajibkan pemerintah dan dianjurkan mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diadakan Pemda dan perusahaan yang ada di Kota Sukabumi.

Kata kunci: kesiapan, tenaga kerja, Masyarakat Ekonomi ASEAN, pemerintah daerah

PENDAHULUAN

Keimigrasian adalah hal ihwal Kalau lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara." Pasal 1 Angka 1 UU.No. 6

Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

den
Indo
terb
ting
renc
yang
pun
bers
nega
mer
ini c
yaitu
asin
Indo
Asin
bagi
Ban
men
Kete
baik
NKR
dan

Indo
deng
yang
Masy
terse
warg
jarar
nega
dalam
kemt
sport
masy
untu
untu

Persoalannya adalah bahwa dengan ada imigrasi penduduk Indonesia yang merupakan terbanyak ke 4 di dunia mempunyai tingkat pendidikan yang masih rendah. Selain tingkat pendidikan yang rendah juga kreatifitas nya pun rendah sehingga akan sulit bersaing dengan tenaga kerja negara lain yang akan datang menyerbu negara kita ini. Hal ini diatur juga dalam UUD 1945 yaitu mengenai tenaga kerja asing yang memasuki wilayah Indonesia yaitu "Hanya Orang Asing yang memberikan Manfaat bagi Kesejahteraan Rakyat, Bangsa dan Negara RI, serta tidak membahayakan Keamanan dan Ketertiban, juga tidak bermusuhan baik terhadap Rakyat maupun NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Bagaimana warga negara Indonesia akan mampu bersaing dengan warga negara asing yang tergabung dalam kelompok Masyarakat Ekonomi ASEAN tersebut. Sebab persaingan antar warga negara Indonesia saja cukup jarang terjadi, sehingga warga negara Indonesia belum terbiasa dalam menjalani dan menumbuhkan kembangan persaingan yang sportif. Tetapi dengan ada MEA masyarakat Indonesia dituntut untuk segera mempersiapkan diri untuk berlomba mendapatkan dan

menciptakan usaha atau pekerjaan baik itu di dalam negeri sendiri dan terlebih lagi dilingkungan negara asing yang tergabung dalam kelompok MEA tersebut.

Beberapa negara membutuhkan prosedur yang sangat sulit untuk mendapatkan selebar visa kunjungan yang menempel di Paspor kebangsaan, perlu diingat bahwa visa kunjungan adalah khusus untuk kunjungan singkat seperti pariwisata dan kunjungan keluarga atau yang sering disebut kunjungan sosial budaya.

Menurut indeks yang diterbitkan Henley & Partners, Indonesia/negara kita termasuk negara yang mudah dimasuki oleh warga negara asing, tetapi tidak sebaliknya WNI tidak diterima begitusaja secara mudah disebagian besar negara negara di dunia.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh hampir semua kabupaten/kota di Indonesia dalam menghadapi mea adalah pengangguran yang jumlahnya semakin meningkat, tetapi masalah utamanya adalah pengangguran tersebut mayoritas tidak memiliki keahlian serta mempunyai pendidikan yang rendah. Begitu juga yang dihadapi oleh Kota Sukabumi, menurut Wali Kota Sukabumi M Muraz pengangguran

masih menjadi masalah utama hampir di seluruh daerah di Indonesia khususnya di Kota Sukabumi, Jawa Barat. “Saat ini terdapat ketidakseimbangan antara penyediaan tenaga kerja dengan permintaan tenaga kerja yang dampak utamanya akan membengkaknya jumlah pengangguran dan masalah sosial yang menyertainya,” katanya di Sukabumi, Sabtu (18/4).

Adapun data pengangguran di Kota Sukabumi menurut Kepala seksi Penempatan Tenaga kerja Dalam dan Luar Negeri Disnakertrans Sukabumi Tatang Arifin (17/3) menyebutkan pengangguran sebanyak 6000 orang dan akan bertambah seiring dengan kelulusan sekolah SMA maupun SMK Tahun ini. Data tersebut besar yang mana tenaga sesuai dengan pendaftaran atau permintaan pembuatan Kartu Kuning bagi Tenaga Kerja. Lebih lanjut dia menerangkan tenaga kerja tersebut mayoritas memiliki pendidikan SMA sedangkan SMK atau yang mempunyai keahlian spesifik tidak lebih dari 15%, hal ini akan membuat semakin sulitnya tenaga kerja baru tersebut untuk bersaing terlebih nantinya apabila serbuan tenaga kerja asing melalui program MEA terwujud masyarakat kita akan semakin sulit bersaing ujarnya.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalahnya adalah sebagai berikut.

1. Sejauh mana kesiapan pemerintah Daerah Kota Sukabumi dalam menghadapi era masyarakat ekonomi ASEAN dan sejauhmana kesiapan masyarakat terhadap persaingan usaha ekonomi kreatif;
2. Upaya apa yang telah ditempuh oleh pemerintah Kota Skaukabumi sehingga hak masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan dan kemudahan usaha dapat terjamin;
3. Upaya apa dan hambatan apa saja yang dihadapi oleh pengusaha dan dunia usaha Indonesia untuk menambah keterampilan tenaga kerja lokal dan mampu bersaing dengan produk sejenis dari negara ASEAN.

TINJAUAN TEORETIS

Tenaga kerja merupakan unsur utama dalam pengembangan sebuah negara, semakin meningkat daya saing atau keahlian yang dimiliki oleh masyarakat dalam sebuah negara akan semakin maju pula negara tersebut. Peningkatan

day
diti
lain
sair
tola

ma
ilmu
me
me
sur
sua
ber
yan
Org
dih
yan
ters
yan
seb
yar
keti
me:

10)
ma
me:
ten
efis
tju
ma:
Sir
sun
"pe
per
jasa
ang
kar

daya saing ketenagakerjaan ditinjau dari beberapa aspek antara lain aksesibilitas, kualitas dan daya saing, point ini akan menjadi titik tolak dalam penelitian ini.

Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari ilmu manajemen, yang berarti merupakan suatu usaha untuk mengarahkan dan mengelola sumber daya manusia di dalam suatu organisasi agar mampu berfikir dan bertindak sebagaimana yang diharapkan organisasi. Organisasi yang maju tentu dihasilkan oleh personil/pegawai yang dapat mengelola organisasi tersebut ke arah kemajuan yang diinginkan organisasi, sebaliknya tidak sedikit organisasi yang hancur dan gagal karena ketidakmampuannya dalam mengelola sumber daya manusia.

Menurut Hasibuan (2001: 10) manajemen sumber daya manusia adalah " Ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat ". Sedangkan menurut Simamora (2004: 4) manajemen sumber daya manusia adalah, "pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok karyawan, juga menyangkut

desain dan implementasi sistem perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan karier, evaluasi kinerja, kompensasi karyawan dan hubungan ketenagakerjaan yang baik.

Terkait dengan Manajemen Kependudukan Robert Thomas Malthus (1766 – 1834), tentang Teori Kependudukan Malthus dalam tulisannya "*A Summary View of the Principles of Population*" yang dipublikasikan pada 1830 " di mana Malthus memulai dengan merumuskan dua postulat yaitu :

- a. Bahwa pangan dibutuhkan untuk hidup manusia dan
- b. Bahwa kebutuhan nafsu seksual antarjenis kelamin akan tetap sifatnya sepanjang masa.

Atas dasar postulat tersebut Malthus menyatakan bahwa, jika tidak ada pengekangan, kecenderungan pertambahan jumlah penduduk akan lebih cepat dari pertambahan sub system (pangan). Perkembangan penduduk akan mengikuti deret ukur, sedangkan perkembangan subsistem (pangan) mengikuti deret hitung dengan interval waktu 25 tahun.

Dengan demikian kata kunci dari teori tersebut adalah penetapan sumberdaya dan

bagaimana mengidentifikasi persaingan. Sumberdaya organisasi tentu yang dimiliki oleh organisasi yang terdiri dari manusia dan benda/barang yang dalam hal ini apakah sumberdaya tersebut telah siap menghadapi persaingan yang sedemikian cepat. Identifikasi persaingan dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti misalnya mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi organisasi baik sekarang maupun ke depan.

Lebih jauh dijelaskan definisi strategi mengandung dua komponen yang saling melengkapi, yaitu: *future intentions* atau pengembangan pengawasan jangka panjang dan menetapkan komitmen untuk mencapainya, dan *competitive advantage* atau pemahaman yang dalam, tentang cara terbaik untuk berkompetisi dengan pesaing di dalam pasar. Konteks ini bila diejawantahkan ke dalam organisasi pemerintahan cukup relevan, karena dimasa sekarang organisasi pemerintahan dituntut pula untuk mengikuti perkembangan pasar, seperti perkembangan iptek, tata aturan global. Hal yang berbeda dalam organisasi pemerintahan adalah strategi pemberdayaan sumberdaya yang ada masih sangat tergantung dari sistem anggaran yang ada. Oleh karena

itu strategi pengembangan sumberdaya manusia pada organisasi pemerintahan ditujukan pada sistem tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (1995: 859) "Strategi memiliki arti sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus" Strategi dapat juga diartikan seni atau ilmu mengembangkan dan menggunakan berbagai kekuatan untuk mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu organisasi harus mengikuti perkembangan, tidak kaku dan senantiasa mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan. Pengertian strategi sebagai seni adalah memiliki rasa keindahan dan tidak menimbulkan kebosanan/stagnasi dalam organisasi, di manapun, kapanpun dan siapapun yang terlibat sebagai subyek ataupun obyek dari strategi tersebut akan menyukai untuk menjalaninya. Sedangkan arti seni dari strategi tersebut harus pula memiliki landasan ilmu, tidak abstrak dan dapat diuji dengan kajian ilmiah. Berdasarkan pengertian di atas, strategi diperlukan oleh karena adanya keterbatasan-keterbatasan dalam penyediaan sumber daya, sehingga perlu disusun skala prioritas tersendiri dalam mencapai

tujuan
daya
sangat
pener
(200
maka
seba

daya
bagi
man
Indo
man
lebih
an.
mun
tenta
upak
pega
I
aktiv
ke w
mase
mase
ada
deng
pend
mase
antar
Meka
Pater
Sister

I
apab
berhu
kerja,
orgar
faktor

tujuan. Posisi manajemen sumber daya manusia di era globalisasi ini sangat strategis. Selaras dengan pendapat tersebut, Simamora (2004: 20) memosisikan manajemen sumber daya manusia sebagai posisi yang *strategic*.

Sejarah manajemen sumber daya manusia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari manajemen pada umumnya. Di Indonesia masalah sumber daya manusia baru mulai diperhatikan lebih serius pada tahun 1970-an. Hal ini dibuktikan dengan munculnya Undang-undang tentang tenaga kerja, peraturan upah minum, kesejahteraan pegawai dan sebagainya.

Dalam setiap kegiatan atau aktivitas organisasi dari waktu ke waktu selalu timbul masalah-masalah. Untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul ada beberapa pendekatan sesuai dengan periodenya. Ada tiga pendekatan dalam menangani masalah sumber daya manusia, antara lain: (1) Pendekatan Mekanis, (2) Pendekatan Paternalisme, dan (3) Pendekatan Sistem Sosial.

Dalam pendekatan mekanis, apabila ada permasalahan yang berhubungan dengan tenaga kerja, maka unsur manusia dalam organisasi disamakan dengan faktor produksi lain, sehingga

pimpinan perusahaan cenderung menekan pekerja dengan upah yang minim sehingga biaya produksi rendah. Pandangan pendekatan ini menunjukkan sikap bahwa tenaga kerja harus di kelompokkan sebagai modal yang merupakan faktor produksi. Dengan hal ini maka di usahakan untuk memperoleh tenaga kerja yang murah namun bisa di manfaatkan semaksimal mungkin dan memperoleh hasil yang lebih besar untuk kepentingan pemberi kerja.

Pendekatan Paternalisme merupakan suatu konsep yang menganggap manajemen sebagai pelindung terhadap karyawan, berbagai usaha telah dilakukan oleh pimpinan perusahaan supaya para pekerja tidak mencari bantuan dari pihak lain. Pendekatan Sistem Sosial memandang Manajemen Sumber Daya Manusia atau personalia merupakan proses yang kompleks. Dengan kekompleksan kegiatan manajemen Sumber Daya Manusia, maka pimpinan perusahaan mulai mengarah pada pendekatan yang lain yaitu pendidikan sistem sosial yang merupakan suatu pendekatan yang dalam pemecahan masalah selalu memperhatikan faktor-faktor lingkungan. Setiap ada permasalahan, maka diusahakan dipecahkan dengan sebaik mungkin dengan risiko yang

paling kecil, baik bagi pihak tenaga kerja maupun pemberi kerja.

Dalam praktiknya fungsi operasional manajemen sumber daya manusia meliputi poin-poin berikut.

- (a) perencanaan tenaga kerja, yaitu upaya untuk merencanakan jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan guna mencapai tujuan organisasi ini. Fungsi ini mulai analisis pekerjaan, rekrutmen, penempatan sampai pada orientasi pekerjaan.
- (b) pengembangan tenaga kerja, yaitu suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan-peningkatan kualitas tenaga kerja sehingga dapat mengurangi ketergantungan organisasi untuk menarik karyawan baru.
- (c) penilaian prestasi kerja, yaitu salah satu aspek yang penting dalam pengelolaan sumber daya manusia. Dengan adanya penilaian prestasi kerja, maka dapat diketahui karyawan yang mempunyai prestasi kerja yang baik maupun yang kurang. Hal ini akan berdampak pada pemberian kompensasi.
- (d) Pemberian kompensasi, di mana fungsi pemberian

kompensasi meliputi kegiatan pemberian balas jasa kepada para karyawan. Kegiatan disini meliputi penentuan sistem kompensasi yang mampu mendorong prestasi karyawan, dan juga menentukan besarnya kompensasi yang akan diterima oleh masing-masing pekerja secara adil.

- (e) Pemeliharaan tenaga kerja ada pelaksanaan aspek ekonomis dan non ekonomis yang diharapkan dapat memberikan ketenangan kerja dan konsentrasi penuh bagi pekerja guna menghasilkan prestasi kerja yang di harapkan oleh organisasi. Aspek ekonomis berhubungan dengan pemberian kompensasi yang berupa gaji dan bonus yang sebanding dengan hasil kerjanya. Aspek non ekonomis berupa adanya jaminan kesehatan, kesejahteraan dan keamanan serta kenyamanan dalam bekerja.

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi/

orga
bera
berc
tujui
seca
MSI
Ilmu
Scie
fung
pela
pere
staffi
men

orga
dari
di
adal
suml
inter
kepe
ekste
seba
atas,
men
valu
kebe
SDM
adva
Deng
suml
adali
valu
meng
adva
man
man
hanc

organisasi. Selanjutnya, MSDM berarti mengatur, mengurus SDM berdasarkan visi perusahaan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara optimum. Karenanya, MSDM juga menjadi bagian dari Ilmu Manajemen (Management Science) yang mengacu kepada fungsi manajemen dalam pelaksanaan proses-proses perencanaan, pengorganisasian, *staffing*, memimpin, dan mengendalikan.

Peran strategis SDM dalam organisasi bisnis dapat dielaborasi dari segi teori sumber daya, di mana fungsi perusahaan adalah mengerahkan seluruh sumber daya atau kemampuan internal untuk menghadapi kepentingan pasar sebagai faktor eksternal utama. Sumber daya sebagaimana disebutkan di atas, adalah SDM strategis yang memberikan nilai tambah (*added value*) sebagai tolok ukur keberhasilan bisnis. Kemampuan SDM ini merupakan *competitive advantage* dari perusahaan. Dengan demikian, dari segi sumber daya, strategi bisnis adalah mendapatkan *added value* yang maksimum yang dapat mengoptimalkan *competitive advantage*. Adanya SDM *expertise*: manajer strategis (*strategic managers*) dan SDM yang handal yang menyumbang

dalam menghasilkan *added value* tersebut merupakan *value added* perusahaan. *Value added* adalah SDM strategis yang menjadi bagian dari human capital perusahaan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif digunakan untuk membangun model guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan berpedoman pada hipotesis kerja. Agar model yang dibangun melalui studi kasus lebih dapat diandalkan, maka juga dilakukan pengujian dan pengukuran terhadap variabel dan dimensi yang termuat dalam hipotesis kerja.

Saefullah (1993: 4) menyatakan bahwa analisis pada tingkat mikro yang berdasarkan penelitian lapangan perlu didukung oleh data kuantitatif dan kualitatif, untuk mengontrol informasi yang bersifat kualitatif diperlukan adanya informasi yang bersifat kuantitatif, untuk memperjelas data kuantitatif diperlukan informasi yang bersifat kualitatif.

PEMBAHASAN

Struktur perekonomian Kota Sukabumi, sektor perdagangan merupakan sektor yang paling dominan dan memberikan kontribusi paling besar terhadap PDRB Kota Sukabumi yaitu,

mencapai 47,80 % pada tahun 2013. Berdasarkan data Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi pada tahun 2013, diketahui bahwa Pertambahan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kota Sukabumi adalah sebanyak 528 perusahaan, sedangkan pada tahun 2012 sebanyak 526 perusahaan. Dari sebanyak 528 perusahaan yang memiliki SIUP tersebut terdiri dari 2 perusahaan besar, 96 perusahaan menengah, 380 perusahaan kecil, dan 50 perusahaan mikro.

Sedangkan jumlah perusahaan yang mengajukan Permintaan Tanda Daftar Perusahaan pada tahun 2013 mengalami penurunan sebanyak 3,42 % dibanding tahun 2012. Dari sejumlah 452 perusahaan yang mengajukan Tanda Daftar Perusahaan, tercatat sebanyak 81 perusahaan berbentuk badan usaha PT, 14 perusahaan berbentuk Koperasi, 118 perusahaan berbentuk CV, dan 239 perusahaan berbentuk PO.

Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan makin meningkatnya usaha pembangunan maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu

lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Pembangunan akan semakin meningkat jika lalu lintas perhubungan darat tidak mengalami hambatan, karena perhubungan darat merupakan salah satu sektor yang cukup besar peranannya dalam pembangunan untuk membuka isolasi suatu daerah. Salah satu indikator keberhasilan sektor perhubungan adalah dengan tersedianya fasilitas jalan.

Panjang jalan dapat menunjukkan tingkat keterbukaan dan perkembangan masyarakat suatu wilayah. Semakin panjang suatu jalan, maka tingkat keterbukaan dan perkembangannya semakin tinggi. Oleh karena itu tersedianya fasilitas jalan sangat dibutuhkan dalam melayani kebutuhan masyarakat terutama menggerakkan lalu lintas perekonomian di perkotaan.

Menurut statusnya jalan terbagi atas 3 kategori, yaitu jalan negara, jalan propinsi, dan jalan kabupaten/kota. Panjang jalan negara di Kota Sukabumi pada tahun 2013 mencapai 8,50 km dengan kondisi baik 5,50 km. Panjang jalan propinsi mencapai 26,65 km dengan kondisi baik 14,66 km. Sementara itu panjang jalan kota mencapai 133,25 km dengan rincian: sepanjang 89,14 km kondisinya baik, sepanjang 37,84 km kondisinya sedang,

sep.
rusa
dala

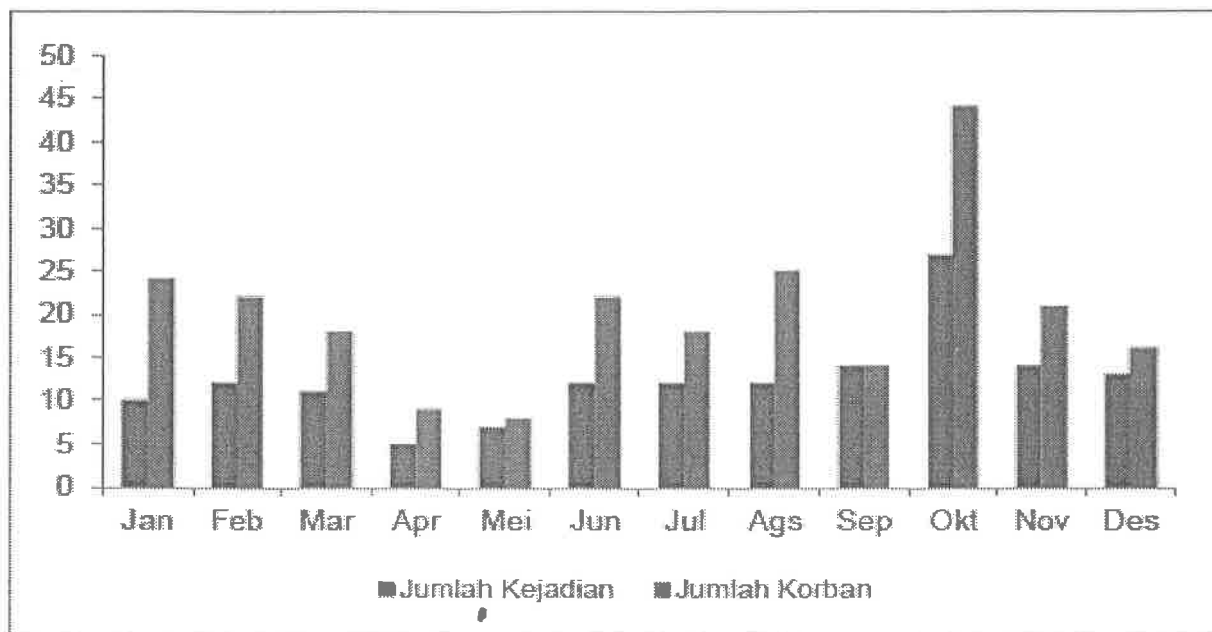
mas
dila
ang
kota
ada
bus
Ter
yan
pen
Bar
terc
yan
Bar
pad
Cisc
dibe

sepanjang 4,38 km kondisinya rusak, dan sepanjang 1,88 km dalam kondisi rusak berat.

Pelayanan transportasi umum masyarakat Kota Sukabumi dilaksanakan melalui perusahaan angkutan dalam kota dan luar kota. Pada tahun 2013, tercatat ada tiga belas tujuan perjalanan bus yang diberangkatkan dari Terminal Bus Sukabumi. Tujuan yang paling banyak diminati oleh penduduk Kota Sukabumi adalah Bandung. Pada tahun tersebut, tercatat ada 143.400 penumpang yang diberangkatkan menuju Bandung. Rute lain yang cukup padat adalah Kota Sukabumi – Cisolok. Jumlah penumpang yang diberangkatkan menuju Cisolok

tercatat sebanyak 70.155 orang. Sementara itu data kecelakaan di wilayah Kota Sukabumi pada tahun 2013 turun sekitar 20,74% dibandingkan dengan tahun lalu. Dari 149 kejadian kecelakaan, sebanyak 48 korban meninggal dunia, 15 orang mengalami luka berat, dan 178 orang mengalami luka ringan. Kerugian materi yang diderita akibat kecelakaan tersebut mencapai 151,525 juta rupiah.

Kereta Api merupakan sarana transportasi yang relatif murah bagi masyarakat Kota Sukabumi. Namun sejak ditutupnya lalu lintas kereta api sejak tanggal 9 Juli 2006, maka tidak ada lagi jalur transportasi kereta api yang melayani masyarakat Kota



Grafik 1

Jumlah Kejadian dan Jumlah Korban Kecelakaan di Kota Sukabumi 2013 (Dirinci per Bulan)

Sukabumi. Kemuadian tanggal 15 Desember 2008 jalur tersebut mulai dibuka kembali dengan rute Sukabumi-Bogor. Pada tahun 2013, jumlah penumpang yang diangkut sebanyak 50.956 orang, sedangkan jumlah pendapatan PT Kereta Api Stasiun Sukabumi mencapai 893,414 juta rupiah.

Perkembangan pembangunan di Kota Sukabumi yang semakin pesat menuntut pula peningkatan pelayanan pos dan telekomunikasi. Pembangunan pos dan telekomunikasi mencakup jangkauan baik pelayanan dan peningkatan kerjasama baik regional maupun internasional serta peningkatan jasa telekomunikasi dan informasi sehingga arus berita, informasi dan data dapat berjalan lancar. Karena itu, PT Pos Indonesia Sukabumi dan PT Telkom Sukabumi dituntut untuk meningkatkan kinerjanya guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Namun demikian, seiring dengan semakin meningkatnya sistem teknologi informasi dan komunikasi, mengakibatkan turunnya jumlah masyarakat yang menggunakan jasa pos. Hal ini terlihat dari menurunnya volume jasa pos (baik surat maupun jasa kiriman uang) yang dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia Kota Sukabumi. Dari data PT Pos Sukabumi tahun 2013

tercatat banyak surat biasa yang dikirim lewat Pos Sukabumi hanya mencapai 85.046 surat. Sedangkan untuk jenis, kilat khusus, perlakuan khusus, dan ekspres pos masing-masing sebanyak 91.658 buah, 73.647 buah, dan 45.784 buah. Banyaknya pos paket yang dikirim melalui PT Pos Sukabumi pada tahun 2013 sebanyak 10.166 buah yang terdiri dari 7.924 pengiriman biasa dan 3.222 pengiriman kilat khusus.

Kegiatan perhotelan di Kota Sukabumi dapat dilihat dari banyaknya perusahaan akomodasi dan tamu yang menginap. Pada tahun 2013 jumlah perusahaan akomodasi di Kota Sukabumi sebanyak 32 buah yang terdiri dari 757 kamar dan 1.120 tempat tidur. Sementara itu banyaknya tamu yang menginap pada tahun 2012 sebanyak 140.500 orang yang terdiri dari wisatawan mancanegara sebanyak 365 orang dan wisatawan nusantara sebanyak 140.135 orang. Jumlah tamu yang menginap tersebut mengalami penurunan sebesar 0,35% jika dibandingkan dengan tahun 2011 yang berjumlah 141.000 orang. Jika dilihat per kecamatan, dapat diketahui bahwa tamu yang menginap di hotel, masih didominasi di wilayah Kecamatan Cikole, yaitu mencapai 65,97%. Hal ini dimungkinkan

kare
bera

di p
sang
(pad
1 ol
72 r
café,
serta
lainn
kara

SIM

Simj

I
deng
maka
Suka
meng
wawi
Evi (
2017
Dam.
Kadis
pada
Kope
Perin
dan
Indra
meng

li
o
b
st
b

karena wilayah Kecamatan Cikole berada di pusat Kota Sukabumi.

Adapun kegiatan pariwisata di Kota Sukabumi relatif masih sangat kecil. Secara keseluruhan (pada tahun 2012) hanya tercatat 1 obyek wisata, 1 perkemahan, 72 rumah makan/restoran, 5 bar/café, 32 hotel, 6 kolam renang serta beberapa usaha pariwisata lainnya yang meliputi bilyard, golf, karaoke, dan ketangkasan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan wawancara dengan berapa narasumber, maka dapat disimpulkan Kota Sukabumi mempersiapkan diri menghadapi MEA sebagai berikut. wawancara dengan Bappeda Hj. Evi Giwang Pratiwi pada 11 Juli 2017, Dinasakertran Sekdis, Iyan Damayanti pada 12 Juli 2017, Kadis Sosial H. Bude Daryana pada 29 Agustus 2017, dan Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kasie Pengembangan dan Pelatihan Industri, Raif Indraguna pada 30 Agustus 2017 mengutarakan sebagai berikut.

Informasi yang diberitakan oleh media memperlihatkan beberapa hal yang bersifat strategis dan pertama, terlihat bagaimana tidak meratanya

kesiapan masyarakat terhadap pemberlakuan MEA itu sendiri. Perbandingan dengan daerah lain menggambarkan ketidaksamarataan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Jelas Indonesia yang memiliki 34 provinsi tersebar di seluruh Indonesia akan menghadapi perbedaan satu sama lain.

Adapun yang lain adalah Kota Sukabumi yang dianggap memiliki kesiapan yang lebih baik dibandingkan dengan daerah lain. Tentu ini perlu diukur secara lebih baik sehingga mendapatkan tingkat validitas dan reliabilitas yang lebih tinggi. Semuanya harus diukur dengan baik. Namun demikian, terlepas dari itu semua, tentu tetap menjadi perhatian bagi setiap orang untuk terus memperhatikan kualitas diri dan bisnis mereka agar bisa mencapai keunggulan bersaing yang berkelanjutan.

Pertama, tetap yang diharapkan adalah bagaimana wirausaha fokus dalam meningkatkan mindset atau sikap mental dalam berbisnis. Ini jelas berhubungan dengan bagaimana wirausaha melihat setiap peluang yang muncul dari setiap perubahan lingkungan bisnis. Kemudian, bagaimana juga mental yang berhubungan dengan masalah yang akan dihadapi oleh setiap wirausaha ketika menjalankan

bisnis, semuanya relevan dengan mental karena berbeda dengan yang hanya bicara teori sementara bukan menjadi seorang pelaku bisnis.

Kedua, bagaimana wirausaha itu fokus meningkatkan kualitas bisnis mulai dari pengelolaan *resources*, kapabilitas, *competency* sampai dengan *core competency* terhadap pengelolaan bisnis yang diperlihatkan pada keuangan, pemasaran, proses bisnis dan sumber daya manusia dan penggunaan teknologi informasi untuk mencapai *sustainable competitive advantage* dalam bisnis ditengah tingginya tingkat persaingan bisnis yang dihadapi oleh wirausaha.

Ketiga, fokus dalam memanfaatkan *social capital* atau modal sosial yang tersedia dari bagaimana wirausaha membangun hubungan atau jaringan dengan stakeholders yang terdiri dari akademisi, perusahaan, pemerintah, komunitas, media dan perbankan. *Social capital* itu menjadi point untuk bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada dari stakeholders. Terus mencari peluang yang ada dan memanfaatkan untuk bisnis masing-masing.

Inilah yang perlu menjadi perhatian wirausaha untuk

menghadapi MEA dan mencapai keunggulan di MEA. Teruslah belajar dan fokus pada bisnis sembari membangun hubungan baik dengan stakeholders lainnya. Kepentingan wirausaha itu akan dapat dipenuhi dengan *knowledge management* atau bagaimana mengelola pengetahuan tentang *entrepreneurship*, bisnis dan lingkungan bisnis serta manajemen.

Kontribusi terhadap perekonomian di wilayah Kota Sukabumi, sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB adalah dari sektor perdagangan, hotel dan restoran, yaitu mencapai 47,80 %, disusul oleh sektor pengangkutan dan komunikasi 16,43 persen serta sektor jasa-jasa 12,53 persen. Dominasi ketiga sektor tersebut terhadap PDRB mengukuhkan posisi Kota Sukabumi sebagai kota perdagangan dan jasa. Sedangkan sektor pertambangan dan penggalian tidak menunjukkan adanya kegiatan ekonomi aktif secara signifikan di Kota Sukabumi sehingga tidak tercatat output sektor tersebut dalam PDRB Kota Sukabumi.

Upaya apa yang telah ditempuh oleh pemerintah Kota Sukabumi sehingga hak masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan dan kemudahan usaha dapat terjamin adalah dengan menambahkan dan mengalokasikan Anggaran

Ke
me
pe
sel
ma
be
lu
Asi

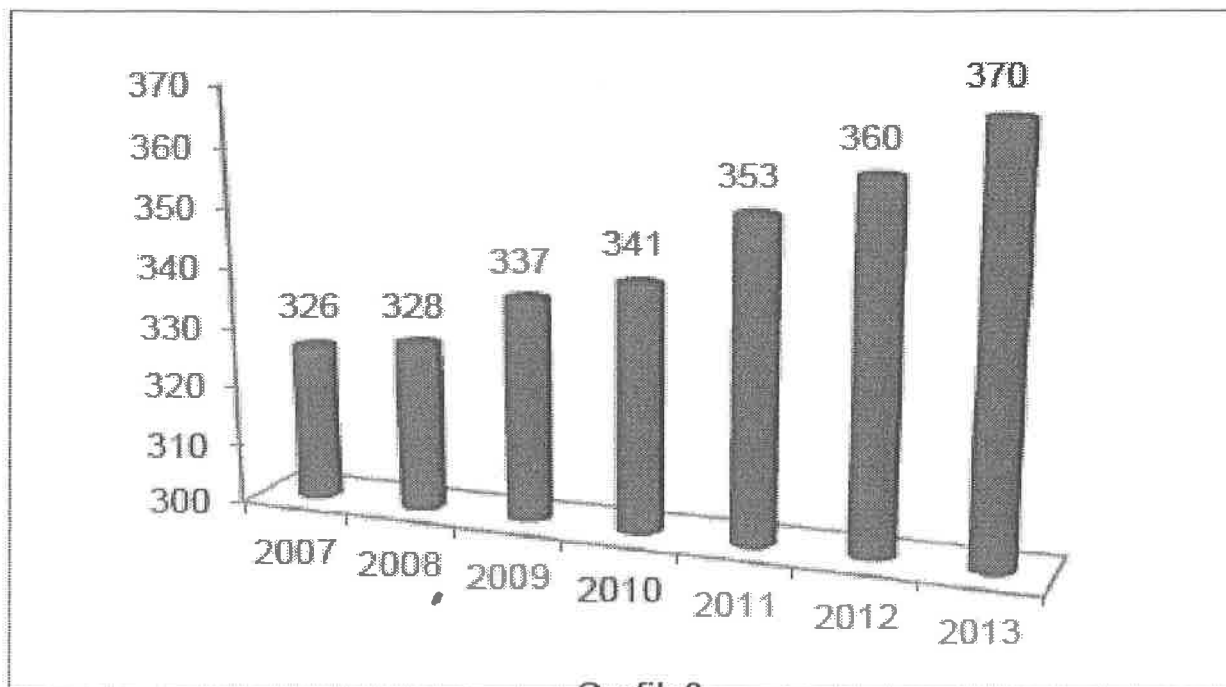
per
Hj.
Jul
Iya
Kac
pac
Kor
Per
dar
Ind
me
tela

Keuangan Daerah untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat sehingga pada saat MEA diterapkan masyarakat Sukabumi mampu bersaing dengan tenaga kerja dari luar Sukabumi dan bahkan negara Asia lainnya

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan Bappeda Hj. Evi Giwang Pratiwi pada 11 Juli 2017, Dinasakertran Sekdis, Iyan Damayanti pada 12 Juli 2017, Kadis Sosial H. Bude Daryana pada 29 Agustus 2017, dan Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kasie Pengembangan dan Pelatihan Industri, Raif Indraguna pada 30 Agustus 2017 menjelaskan bahwa pemerintah telah membantu masyarakat

dengan memberikan pengertian, wawasan tentang MEA serta mengajak masyarakat turut serta dalam pengembangan potensi dengan yang dapat dijadikan komoditi dalam menghadapi MEA selain itu pemerintah Kota Sukabumi membuka seluas-luasnya untuk masyarakat yang ingin meningkatkan keterampilan dan skill dalam pengelolaan potensi wilayah masing-masing dengan mengadakan kerjasama dengan swasta dalam meningkatkan keterampilan yang akan diperlukan oleh dunia usaha melalui diklat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat



Grafik-2

Jumlah Koperasi di Kota Sukabumi

Daerah (DPRD). APBD terdiri atas anggaran pendapatan daerah, anggaran biaya daerah, dan anggaran pembiayaan daerah. Berdasarkan penghitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Sukabumi menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah mencapai Rp843.683.976.684,00. Dari jumlah tersebut, pendapatan paling besar bersumber dari Dana Perimbangan yang mencapai 63,96% dari total pendapatan. Sementara itu Pendapatan Asli Daerah memberikan sumbangan terhadap pendapatan daerah sebesar 20,74%. Realisasi belanja daerah Kota Sukabumi tahun anggaran 2013 mencapai 837.454.350.702,00 rupiah yang terdiri dari Belanja tidak Langsung sebesar 52,49% dan Belanja Langsung sebesar 47,51%.

Berdasarkan UUD 1945, Bab XIV Pasal 33 ayat (1) disebutkan bahwa

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.”

Menurut para ahli ekonomi, lembaga atau badan perekonomian yang paling cocok dengan maksud Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 adalah koperasi. Dalam koperasi, modal dan kegiatan usaha dilakukan secara bersama-sama dan

hasilnya juga untuk kesejahteraan anggotanya secara bersama-sama.

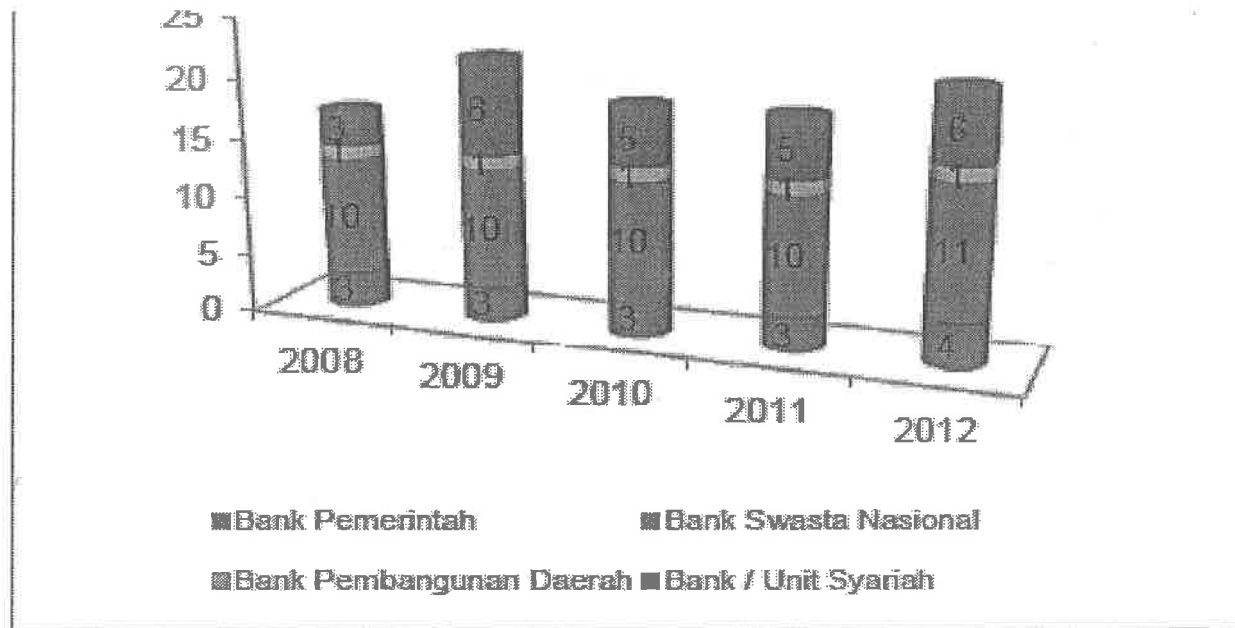
Kegiatan perekonomian di Kota Sukabumi juga disemarakkan dengan adanya berbagai jenis koperasi. Keberadaan koperasi penting karena ia memiliki fungsi dan peranan antara lain yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, serta mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa.

Jika dilihat dari jenis usaha komoditi dominan, koperasi di Kota Sukabumi didominasi oleh koperasi warga. Koperasi ini memiliki jumlah usaha terbanyak yakni 110 unit. Akan tetapi, jenis koperasi yang memiliki anggota paling banyak adalah koperasi BMT. Koperasi ini memiliki anggota sebanyak 8.297 orang dengan jumlah usaha 12 unit. Pada 2013, banyaknya koperasi aktif di Kota Sukabumi mencapai 370 buah dengan jumlah anggota sebesar 31.987 orang. Dari sejumlah koperasi tersebut, diperoleh total simpanan sebesar Rp30.056.725.000,00

Menurut UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dapat

di
me
me
da
ba
itu
pe
pe
pro
pe
sar
akt

Inc
akt
ba
ad
me
set
Rp



Grafik 3

Jumlah Bank Menurut Kelompok di Kota Sukabumi

diartikan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Oleh karena itu, perbankan memegang peranan sentral dalam suatu perekonomian. Terganggunya proses penghimpunan dan penyaluran dana tersebut akan sangat berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian.

Berdasarkan data dari Bank Indonesia Bandung, banyaknya aktiva Rupiah dan valuta asing bank umum dan BPR yang ada di Kota Sukabumi, tercatat mengalami kenaikan sebanyak 3,16%, yaitu dari Rp98.758.381 juta pada tahun

2012 menjadi Rp9.035.525 juta pada tahun 2013. Sedangkan besarnya simpanan dana pihak ketiga mengalami kenaikan sebesar 12,63% yaitu dari Rp4.369.343 juta pada tahun 2012 menjadi Rp4.921.156 juta pada tahun 2013.

Industri perbankan yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana memegang peranan sentral dalam suatu perekonomian. Terganggunya proses penghimpunan dan penyaluran dana tersebut akan sangat berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian.

Berdasarkan data dari Bank Indonesia Bandung, tercatat sebanyak 22 kantor bank yang

terdiri dari Bank Pemerintah sebanyak 4 buah, Bank Swasta Nasional sebanyak 11 buah, Bank Pembangunan Daerah sebanyak 1 buah dan Bank/Unit Syariah sebanyak 6 buah. Berbagai macam peristiwa ekonomi, politik, gejolak masyarakat dan perubahan harga barang/jasa mengakibatkan terjadinya perubahan pola konsumsi masyarakat di Kota Sukabumi. Oleh karena itu, tersedianya data harga eceran sembilan bahan pokok sebagai salah satu bahan dasar dalam penyusunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan inflasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Dimana, IHK merupakan salah satu indikator ekonomi yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan harga barang/jasa yang dibayar oleh konsumen.

Perkembangan harga konsumen di Kota Sukabumi dapat dilihat dari perkembangan harga eceran sembilan bahan pokok harian yang didapat dari hasil survey harga konsumen yang dilakukan di pasar tradisional dan pasar modern yang ada di Kota Sukabumi. Dari hasil pendataan yang telah dilakukan selama tahun 2013, diketahui bahwa rata-rata perkembangan harga konsumen menurut jenis barang untuk komoditi beras pada tahun

2013 sebesar Rp8.090,09 atau meningkat sebesar 3,41% dari tahun 2012. Sedangkan komoditi minyak goreng mengalami penurunan sebesar 2,97% dan komoditi gula pasir mengalami kenaikan sebesar 2,51%.

Kesiapan pemerintah Daerah Kota Sukabumi dalam menghadapi era masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) berdasarkan hasil penelitian antara lain pemerintah Kota Sukabumi sudah menyusun program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan produk unggulan yang akan dijadikan icon dalam menghadapi MEA antara lain memberikan diklat dan kursus yang langsung berhubungan dengan kebutuhan persiapan MA. Misalnya memberikan pelatihan tentang *house keeping* untuk perhotelan sebab dalam rangka MEA jumlah hotel di Kota Sukabumi bertambah dan pelatihan pengelolaan potensi unggulan Sukabumi seperti pembuatan batik khas sukabumi, kerajinan dan lain sebagainya untuk tenaga kerja yang siap disalurkan ke perusahaan-perusahaan yang ada di Sukabumi Pemerintah Daerah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan tersebut dalam mengadakan pelatihan yang sesuai kebutuhan perusahaan.

Adapun kesiapan masyarakat dalam persaingan usaha ekonomi kreatif masyarakat wajibkan

m
su
di
pe
di
ya

di
us
ke
de
de
pe
da
ter
pe
ke

inf
Pr
Di
Da
Ka
pa
Ko
Pe
da
Inc
per
un
ket
car
uni
ma

Sa

di I

mengikuti pendidikan formal yang sudah diwajibkan pemerintah dan dianjurkan mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diadakan Pemda dan perusahaan yang ada di Kota Sukabumi.

Upaya dan hambatan yang dihadapi oleh pengusaha dan dunia usaha Indonesia untuk menambah keterampilan tenaga kerja lokal dengan cara berkerjasama dengan pemda dan perusahaan-perusahaan penyalur tenaga kerja dalam memberikan pelatihan terhadap masyarakat sehingga perusahaan mendapatkan tenaga kerja yang terampil.

Hasil wawancara dengan informan Bappeda Hj. Evi Giwang Pratiwi pada 11 Juli 2017, Dinasakertran Sekdis, Iyan Damayanti pada 12 Juli 2017, Kadis Sosial H. Bude Daryana pada 29 Agustus 2017, dan Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kasie Pengembangan dan Pelatihan Industri, Raif Indraguna pada 30 Agustus 2017 pemerintah mengalokasikan dana untuk membina dan meningkatkan keterampilan masyarakat dengan cara menetapkan anggaran daerah untuk pengembangan keterampilan masyarakat Kota Sukabumi.

Saran

Rekomendasi persoalan MEA di Kota Sukabumi sebagai berikut.

1. Pemerintah Kota Sukabumi lebih meningkatkan anggaran untuk pembinaan masyarakat dengan cara memberikan keterampilan yang pas untuk dunia usaha yang akan dijadikan produk unggulan kota, seperti meningkatnya jumlah hotel, maka pemerintah memberikan pelatihan keterampilan mengenai tugas-tugas yang diperlukan oleh sebuah hotel (*house keeping, recepcioniss*, dan lain sebagainya).
2. Keikutsertaan masyarakat perlu ditingkatkan dengan cara memberikan pencerahan yang pas terhadap masyarakat tentang arti pentingnya MEA dan kesiapan masyarakat merupakan suatu yang mutlak, pemerintah memberikan sosialisasi tentang MEA lebih sering dan intens.
3. Masyarakat diberikan keterampilan dan jaringan pemasaran yang difasilitasi pemerintah daerah dengan cara pemerintah lebih intens mengadakan bazar dan pameran kerajinan, budaya dan potensi daerah sehingga pangsa pasar semakin meningkat sebab masyarakat lokal maupun internasional dapat mengetahui produk unggulan daerah.

